

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan sasaran utama dalam proses pembangunan suatu daerah. Indikator pembangunan manusia menjadi salah satu aspek penting untuk menilai sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah. Manusia bukan hanya menjadi subjek pembangunan, namun juga menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan (BPS, 2023). Salah satu indikator dianggap lebih komprehensif dalam mengukur pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks global, *United Nations Development Programme* (UNDP), memperkenalkan IPM sebagai ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan yang didasarkan pada tiga dimensi utama, yakni umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut mencerminkan kemampuan individu dalam menjalani hidup sehat dan produktif, mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta menikmati taraf hidup yang memadai (UNDP, 2020).

IPM merupakan salah satu indikator penting dalam menilai suatu pembangunan dari sudut pandang kualitas hidup masyarakat. Setiap komponen dalam perhitungan IPM berfungsi untuk menilai sejauh mana pembangunan berhasil memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Perkembangan IPM mencerminkan perubahan dalam pilihan dan keputusan yang diambil oleh masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas. Peningkatan IPM tidak hanya sekedar angka statistik, tetapi merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih menyeluruh. Sehingga, dengan melihat IPM dapat memahami keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam memberikan akses yang adil dan merata terhadap kebutuhan dasar manusia serta bagaimana kebijakan pembangunan dapat membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan manusia. Negara atau wilayah dengan IPM yang tinggi

biasanya menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta semakin baik capaian pembangunan manusianya (Efendi et al., 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data badan pusat statistika, pada tahun 2023 IPM Indonesia mencapai angka 73,55. Berdasarkan klasifikasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan pembangunan manusia di Indonesia, terutama dalam tiga aspek utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (BPS, 2023).



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Aceh Tahun 2016-2023

Sumber: BPS, (2023)

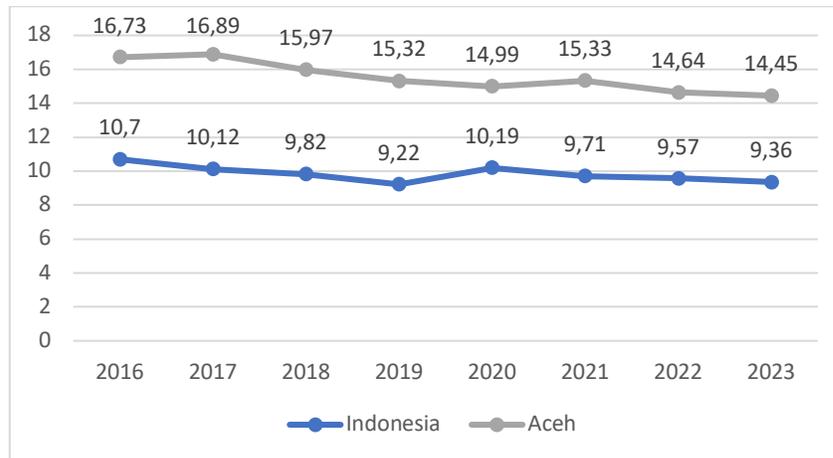
Provinsi Aceh menunjukkan capaian yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 74,03 pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan IPM nasional. Angka ini menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan IPM tertinggi di Pulau Sumatera dan berada pada peringkat ke-11 secara nasional. Gambar 1.1 memperlihatkan perkembangan IPM Provinsi Aceh dan Indonesia selama periode 2016 hingga 2023, yang secara umum menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di kedua wilayah. Peningkatan IPM di Aceh tampak cukup stabil, terutama setelah tahun 2019, di mana terjadi lonjakan yang

berlanjut hingga mencapai angka tertingginya pada tahun 2023. Di sisi lain, IPM Indonesia juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai 73,55 pada tahun yang sama.

Tingginya angka IPM secara agregat di Provinsi Aceh belum mencerminkan pemerataan capaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota. Ketimpangan antar daerah masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan manusia di provinsi ini. Salah satu indikator nyata adalah perbedaan mencolok antara IPM Kota Banda Aceh dengan beberapa kabupaten/kota lain, seperti Kota Subulussalam. Kota Banda Aceh mencatat nilai IPM yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai 88,32, menjadikannya kota dengan IPM tertinggi kedua di Indonesia setelah Yogyakarta. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di Banda Aceh, terutama dalam hal akses pendidikan dan kesehatan, sudah sangat baik. Sebaliknya, Kota Subulussalam memiliki IPM terendah, yaitu hanya 69,66, yang menempatkannya pada posisi paling bawah di antara seluruh daerah di Aceh. Disparitas yang cukup tajam juga terlihat antara kota-kota besar lainnya, seperti Kota Lhokseumawe 80,26 dan Kota Langsa 80,5, dengan beberapa daerah tertinggal seperti Simeulue 69,98 atau Aceh Singkil 71,14. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun rata-rata IPM Provinsi Aceh tinggi, distribusi pembangunan manusia belum merata dan sebagian besar ketimpangan terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Aceh belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, sehingga memunculkan tantangan dalam upaya pemerataan kesejahteraan antarwilayah (BPS, 2023).

Ketimpangan ini juga erat kaitannya dengan fenomena kemiskinan yang masih tinggi di Provinsi Aceh. Persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Provinsi Aceh. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, namun angka kemiskinan tetap berada pada level yang tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Farkhanudin, 2025). Untuk menggambarkan tren tersebut, berikut disajikan data perkembangan persentase penduduk miskin di

Provinsi Aceh dibandingkan dengan rata-rata nasional selama periode 2016 hingga 2023.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Provinsi Aceh Tahun 2016-2023

Sumber: BPS, (2023)

Gambar 1.3 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2016 hingga 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 14,45%, jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 9,36%. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, tren penurunan kemiskinan di Aceh tidak secepat penurunan yang terjadi secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu ditingkatkan melalui intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam aspek sosial dan ekonomi.

Upaya peningkatan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang menysasar sektor-sektor utama pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan pengangguran, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kuswanto & Bawono, 2023). Optimalisasi peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan IPM tercermin dari perkembangan sejumlah indikator makroekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, belanja pemerintah di sektor pendidikan dan

kesehatan, tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran. Melalui indikator-indikator tersebut, kontribusi nyata pemerintah dalam memperkuat pembangunan manusia di Provinsi Aceh dapat diidentifikasi dan dianalisis secara lebih komprehensif.

Peningkatan IPM tidak terlepas dari kemampuan ekonomi suatu daerah, yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Semakin besar pendapatan per kapita suatu daerah, semakin besar pula kapasitas fiskal untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada dalam kisaran 2,42% hingga 11,34% per tahun. Jika dilihat dari capaian tahun 2023, Kota Banda Aceh mencatatkan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu sebesar 90,7 juta. Sebaliknya, Kabupaten Aceh Singkil daerah dengan nilai PDRB per kapita terendah yaitu sebesar 24,03 juta. Temuan dari Nurvita et al. (2022) menguatkan peran pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan IPM di Provinsi Jambi, sementara Awary dan Nilasari (2025) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan positif dalam pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.

Belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga merupakan faktor penting yang mendukung peningkatan IPM. Investasi di kedua sektor ini meningkatkan akses dan mutu layanan yang berdampak langsung pada dimensi pendidikan dan kesehatan dalam IPM. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan. Penelitian oleh Lantion et al. (2023) di negara-negara ASEAN menemukan bahwa belanja sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Alokasi belanja kesehatan juga ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang merupakan salah satu komponen utama IPM. Meskipun beberapa studi menunjukkan hasil yang bervariasi, seperti temuan Lantion et al. (2023) yang menyatakan bahwa belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di ASEAN, Gumede et al. (2024) justru menggarisbawahi bahwa belanja kesehatan lebih dominan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara maju. Sementara itu, Nurvita et al. (2022) membuktikan bahwa di Provinsi Jambi, belanja kesehatan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM.

Permasalahan tingginya angka pengangguran juga masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan manusia di Aceh. Pengangguran mengurangi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Tingginya tingkat pengangguran mengindikasikan bahwa banyak individu yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan. Kondisi ini menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam perekonomian serta mengakses layanan dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup (Awary & Nilasari, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil dalam sejumlah penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara variabel-variabel makroekonomi dan pembangunan manusia, terutama dalam lingkup regional. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara studi lainnya justru menemukan hasil sebaliknya. Selain itu, pengaruh variabel kemiskinan dan pengangguran terhadap IPM juga belum sepenuhnya konsisten antar daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap IPM di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, kemiskinan dan pengangguran secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2016-2023?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, kemiskinan dan pengangguran secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita, belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, kemiskinan dan pengangguran secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2016-2023.
2. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita, belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, kemiskinan dan pengangguran secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2016-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan kebijakan publik. Dengan menganalisis pengaruh variabel-variabel ekonomi makro seperti PDRB per kapita, belanja sektor pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara spesifik, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis dan menjadi bahan referensi untuk peneliti sejenis tentang pengaruh faktor ekonomi makro daerah terhadap IPM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pemangku kebijakan, khususnya pemerintah Provinsi Aceh, dalam merancang strategi dan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan optimal. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dalam mendorong pembangunan manusia yang merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti telah membatasi ruang lingkup penelitian dengan memasukkan variabel-variabel tertentu seperti PDRB per kapita, belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, kemiskinan, pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, untuk menghindari perluasan konsep dan penyimpangan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan periode tahun 2016 hingga 2023.

